KAJIAN NORMATIF PERPINDAHAN ALIRAN SUNGAI KE LAHAN MASYARAKAT DIKAITKAN DENGAN PENAMBANGAN GALIAN GOLONGAN C

Tjetje Irkomas*

ABSTRACT

The removal of the river formed by the process of natural change is frequently unavoidable. It may occur when the river that has big volume water moves to the little one. This river removal creates a problem of the former status of the land between the government and the people. This article attempts to discuss how government might compromise with the landowner to settle down the dispute of ownership. This is done to fulfill the need of sand and coral for the sake of the fast development in Indonesia.

Kata kunci : Sungai, Penambangan, Galian Golongan C.

I. PENDAHULUAN

Perpindahan aliran sungai yang terbentuk karena proses perubahan alam sering tidak bisa dihindari. Hal demikian sering terjadi pada daerah-daerah sungai yang mempunyai volume air cukup besar dan daerahnya landai, sehingga kadang-kadang dapat menimbulkan aliran sungai baru.

Perpindahan aliran sungai ke aliran yang baru sering menimbulkan permasalahan mengenai status lahan (tanah) bekas sungai. Semula permasalahan ini tidak mencuat ke permukaan, namun dengan merebaknya penambangan galian golongan C di sungai, permasalahan lahan bekas sungai dan aliran sungai yang baru, mencuat ke permukaan. Bahan material yang ada di bekas sungai maupun di sungai yang baru dikuasai oleh pengelola, dalam hal ini Departemen Pekerjaan Umum atau badan usaha milik negara yang dikuasakannya, sedangkan di pihak lain yakni masyarakat pemilik tanah yang terkena aliran sungai baru mengakui bahwa bahan material yang ada di bekas sungai atau yang ada di aliran sungai baru adalah miliknya, dengan alasan bahwa mereka masih tetap membayar pajak bumi dan bangunannya (PBB) atas lahan yang terkena atau menjadi aliran sungai baru tersebut.

* Ketua dan staf pengajar Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman Purwakarta.

Badan usaha milik negara (BUMN) yang dikuasakan mengelola sungai di Jawa Barat adalah Perum Otorita Jatiluhur (disingkat POJ) yang mengelola 21 sungai, diantaranya adalah sungai Citarum, sungai Cipunagara, sungai Cibeet, sungai Cigentis, dan sungai Bekasi. Walaupun POJ mempunyai kewenangan untuk melakukan penambangan di sungai, namun dalam kenyataan POJ tidak melaksanakan langsung penambangan tersebut, melainkan bekerjasama dengan pihak ketiga, yakni penambang. Penambanglah yang melakukan kegiatan di lapangan sedangkan POJ hanya merupakan badan pengawas dari segi teknis.

Apabila ada kegiatan penambangan di sungai, yang menimbulkan permasalahan terhadap masyarakat, maka yang berhadapan langsung dengan masyarakat adalah penambang. Demikian pula jika terjadi tuntutan masyarakat, misalnya ganti rugi, penambanglah yang menghadapi tuntutan tersebut. Sering kali, penambang tidak akan bisa melaksanakan kegiatan penambangan di bekas sungai atau di aliran sungai baru sebelum mengadakan musyawarah dengan masyarakat, misalnya mengenai ganti rugi di atas, sekaligus memberikan ganti rugi kepada masyarakat pemilik lahan, sedangkan di pihak lain pengelola (POJ) lepas tangan.

Apabila dihubungkan dengan ketentuan yang berlaku, tuntutan masyarakat tersebut tidak berlebihan. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 590, Pasal 591, dan Pasal 592 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (disingkat KUH Per) yang ditegaskan kembali dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai, dan Bekas Sungai bahwa pemanfaatan lahan bekas sungai diprioritaskan untuk mengganti lahan yang terkena aliran sungai baru, meskipun dalam kenyataannya bekas aliran sungai lama tetap dikuasai oleh pengelola. Inilah keadaan yang sering menimbulkan permasalahan antara masyarakat dengan para penambang, khususnya penambang galian golongan C.

Dari kondisi tersebut di atas, timbul permasalahan yang menarik untuk dikaji, yaitu siapa atau instansi manakah yang berhak atas lahan bekas sungai atau aliran sungai baru? Menariknya permasalahan ini, karena selain menyangkut hal kepemilikan lahan juga hak kemanfaatan lahan tersebut. Sementara itu, masih belum disadari oleh pihak-pihak yang bersengketa, yang menganggap masing-masing berhak memiliki dan memanfaatkan lahan tersebut. Karena itu, melalui tulisan ini, panulis mencoba mengkaji secara normatif permasalahan di atas, agar memperoleh kesepahaman hukum mengenai kepemilikan lahan di atas.

II. HAK PENGUASAAN DAN PENGUSAHAAN SUNGAI

A. Penguasaan Sungai

Pengaturan tentang sungai terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai. Dalam PP tersebut, antara lain telah diatur mengenai penguasaan sungai, fungsi sungai, dan pengusahaan sungai. Dikatakan dalam PP tersebut, bahwa sungai dikuasai oleh negara yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah. Pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab penguasaannya dilakukan Menteri [Pasal 3 Ayat (1) dan (2)], dalam hal ini adalah Menteri Pekerjaan Umum, yang secara teknis dilakukan oleh oleh Direktur Jenderal Pengairan.

Sementara itu, sungai adalah sebagai sumber air, yang merupakan salah satu sumber daya alam, yang mempunyai fungsi serbaguna bagi kehidupan dan penghidupan manusia. Mengingat fungsi tersebut, maka sungai harus dilindungi dan dijaga kelestariannya, ditingkatkan fungsi dan kemanfaatannya, dan dikendalikan daya rusaknya terhadap lingkungan [Pasal 7 ayat (1) dan (2)].

Berdasarkan ketentuan di atas, sungai memegang peranan penting bagi kehidupan manusia. Peranan penting ini dapat berupa sumber air yang menghidupi penghidupan dan kehidupan, mengandung sumber daya alam lain yang dapat dimanfaatkan manusia, sarana transportasi air, dan lain-lain. Karena itu sungai harus dijaga dan dipelihara fungsi, kemanfaatan, dan kelestariannya.

B. Pengusahaan Sungai

Jika melihat PP No. 35 Tahun 1991 di atas, terdapat beberapa ketentuan yang mengatur masalah pengusahaan sungai. Beberapa ketentuan dimaksud adalah sebagai berikut:

Pasal 14, yang menyebutkan:

- (1) Pengusahaan sungai dan/atau bangunan sungai yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat dilaksanakan oleh Pemerintah.
- (2) Pelaksanaan pengusahaan sungai dan/atau bangunan sungai sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara.
- (3) Selain diusahakan oleh Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2), pengusahaan sungai dan/atau bangunan sungai dapat dilakukan oleh badan hukum, badan sosial, dan perorangan setelah memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang.

Dari ketentuan tersebut, pengusahaan sungai selain dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini BUMN, dapat juga dilakukan oleh badan hukum swasta seperti perseroan terbatas (PT), perseroan comanditer (CV), koperasi, badan sosial seperti yayasan, bahkan perorangan dengan ijin pejabat yang berwenang.

Badan usaha milik negara di Jawa Barat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan pengusahaan sungai adalah Perum Otorita Jatiluhur (POJ), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1990 tentang Perum Otorita Jatiluhur. Lapangan usaha yang dilakukan oleh POJ ditentukan dalam Pasal 7 dan Pasal 8. Pasal 7 menyebutkan:

Dengan mengindahkan prinsip-prinsip ekonomi dan terjaminnya keselamatan kekayaan negara, perusahaan menyelenggarakan usaha-usaha sebagai berikut:

- a. Penyediaan air baku untuk perusahaan air minum, perusahaan listrik, perusahaan perkebunan, perusahaan perikanan, industri, pelabuhan, penggelontoran, dan perusahaan lainnya yang memanfaatkan air.
- b. Usaha pembangkitan listrik tenaga air Ir. H. Juanda dan prasarannya.
- c. Usaha pariwisata, jasa konsultasi, dan usaha-usaha lain yang dapat menunjang tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dengan persetujuan Menteri.

Tujuan yang dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (3) adalah untuk membangun ekonomi nasional dengan berperan serta melaksanakan program pembangunan nasional di dalam bidang air, sumber-sumber air, dan ketenagalistrikan.

Pasal 8 menyebutkan:

- (1) Perusahaan melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 di Sungai Bekasi, Sungai Cikeas, Sungai Cikarang, Sungai Cibeet, Sungai Cipamingkis, Sungai Cigentis, Sungai Citarum, Sungai Cikao, Sungai Ciherangharus, Sungai Cisomang, Sungai Ciherang Nunggali, Sungai Cilamaya, Sungai Cijengkol, Sungai Cileuleuy, Sungai Ciasem, Sungai Cigadung, Sungai Cipunegara, Sungai Cibodas, Sungai Cikandung, Sungai Cibeber, Sungai Cilalanang, dan beserta anak-anak sungainya.
- (2) Pengusahaan air dan sumber-sumber air di sungai lainnya oleh perusahaan ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri

Dari ketentuan kedua pasal di atas, tampak bahwa pada prinsipnya pengusahaan sungai oleh POJ dapat dilakukan dalam empat kategori, yaitu

penyediaan air baku, pembangkit listrik tenaga air, pariwisata, dan jasa konsultasi. Pengusahaan dalam bentuk lain oleh POJ masih dapat dilakukan namun harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Presiden atas usul Menteri Pekerjaan Umum.

Berdasarkan PP di atas, Menteri Pekerjaan Umum mengeluarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 52/PRT/91 tentang Kebijakan Umum Pengelolaan Perum Otorita Jatiluhur, yang mengatur lebih teknis pelaksanaan pengelolaan POJ, baik menyangkut tujuan, tugas, maupun lapangan usahanya. Pasal 2 menyebutkan tujuan POJ sebagai berikut:

Tujuan perusahaan adalah turut membangun ekonomi nasional dengan berperan serta melaksanakan program pembangunan nasional di dalam bidang pengelolaan air, sumber-sumber air, dan tenaga-listrikan secara berencana sesuai dengan kebijakan pemerintah, dengan menyelenggarakan daerah aliran sungai yang meliputi antara lain pengembangan dan penggunaan air dan/atau sumber-sumber air secara menyeluruh dan terpadu dengan mengingat pengembangan regional dan menurut prinsip pengembangan lingkungan hidup serta prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan.

Pasal 6 menyebutkan tugas pokok POJ sebagai berikut:

Perusahaan melaksanakan tugas pokok yang meliputi:

- a. Eksploitasi dan pemeliharaan pengairan dan ketenagalistrikan;
- b. Pengusahaan air, sumber-sumber air, dan ketenagalistrikan;
- c. Pengelolaan daerah aliran sungai, antara lain perlindungan, pengembangan, dan penggunaan air serta sumber-sumber air;
- d. Rehabilitasi prasarana pengairan dan ketenagalistrikan.

Pasal 8 menyebutkan usaha-usaha POJ sebagai berikut:

Untuk mencapai tujuan dan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 6 perusahaan menyelenggarakan usaha-usaha sebagai berikut:

- a. Penyediaan air baku untuk berbagai keperluan, antara lain perusahaan air minum, industri pelabuhan, penggelontoran dan perusahaan lainnya yang memanfaatkan air dan energi air.
- b. b.1 Ketenagalistrikan yang mencakup pembangkitan listrik tenaga air yang dibangun perusahaan di sungai-sungai maupun pembangkit listrik tenaga lainnya untuk keperluan pengembangan usahanya;
- b.2 Pembangkit tenaga listrik dari PLTA Ir. H. Juanda sebagian dijual kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan sebagian lainnya digunakan untuk pengembangan usahanya.

- c. Kepariwisata dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 untuk memanfaatkan air dan sumber air serta lingkungan di sekitarnya.
- d. Jasa konsultasi dan jasa lainnya dalam rangka memanfaatkan sumber daya yang ada di perusahaan.
- e. Penambangan bahan galian golongan C dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dalam rangka memanfaatkan potensi sumber air, sungai, dan sempadannya, serta menjaga kelestariannya.
- f. Penyediaan air industri dan air bersih serta pengolahan air limbah.

Selanjutnya Pasal 9 menyebutkan lokasi yang menjadi sasaran kegiatan-kegiatan POJ sebagai berikut:

Perusahaan melaksanakan kegiatan-kegiatan perencanaan, rehabilitasi, eksploitasi, pemeliharaan, perlindungan, pengawasan, dan pengendalian dalam rangka menyelenggarakan tugas perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 di sungai Bekasi, sungai Cikeas, sungai Cikarang, sungai Cibeet, sungai Cipamingkis, sungai Cigentis, sungai Citarum, sungai Cikao, sungai Ciherangharus, sungai Cisomang, sungai Cuherang Nunggali, sungai Cilamaya, sungai Cijengkol, sungai Cileuyeuy, sungai Ciasem, sungai Cigadung, Cipunegara, sungai Cibodas, sungai Cikandung, sungai Cibeber, sungai Cilalanang, dan anak-anak sungainya termasuk prasarana pengairan yang terkait dalam satu kesatuan wilayah sungai.

Dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut di atas, kewenangan POJ untuk mengusahakan sungai semakin jelas. Yang dimaksud pengusahaan sungai menurut ketentuan di atas adalah pengusahaan air yang ada di sungai, menyewakan lahan yang ada di bantaran sungai, dan melakukan penambangan di sungai.

Dari uraian di atas, dapat dikatakan lapangan usaha POJ selain menyelenggarakan keempat kategori di atas, juga menyelenggarakan kegiatan usaha galian golongan C. Yang termasuk bahan galian golongan C adalah: nitrat, fosfat, garam batu, asbes, talk, mika, magenesit, garfit, yarosit, tawas, leusit, oker, batu pennata, batu setengah permata, pasir kuarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit, zeolit, batu apung, tra, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap, marmer, batu tulis, batu kapur, dolomit, kalsit, granit, berbagai jenis tanah liat, serta pasir dan kerikil.

Dalam merealisasikan usaha penambangan galian golongan C, POJ melakukan pendataan di sungai-sungai yang menjadi penguasaannya, misalnya yang tertuang dalam Hasil Pendataan Sungai tanggal 30 Nopember 1992. Dari hasil pendataan tersebut, ternyata tidak semua sungai mempunyai deposit (mengandung bahan material) yang cukup, tetapi hanya beberapa sungai yang mempunyai deposit dan layak ditambang.

Sungai-sungai yang layak ditambang hanya berjumlah 21 sungai. Sebagai contoh, di bawah ini penulis kemukakan empat sungai yang ditambang dengan para penambangnya, yaitu:

1. Sungai Citarum yang ditambang oleh: KUD Kertasari, P.T. Sapta Muda Jayakarta, P.T. Kutapohaci, P.T. Agung Indah Gandasari, P.T. Bumi Pasir Mandiri, P.T. Trias Serangkai, P.T. Cemerlang Nadasurya, Pusat Koperasi Kostrad, P.T. Tri Tunggal Rahayu, dan P.T. Persada Bumi Kita.
2. Sungai Cibect yang ditambang oleh: P.T. Klampis Ireng, P.T. Batu Kerta Emala, P.T. Argo Primatama, P.T. Pertanian Sinergik, dan P.T. Budi Daya Remaja.
3. Sungai Cipunagara yang ditambang oleh: P.T. Selokencono B.N., P.T. Asta Alam Sentosa, P.T. Aruza Semesta, P.T. Astaka Krya, P.T. Cipunagara Jaya, P.T. Dwi Sakti Bumi Alam, P.T. Harkat Guna Abadi, dan Primkop Polwil Purwakarta.
4. Sungai Cigentis, yang tambang oleh: P.T. Sapta Muda Jayakarta.

Dari contoh ini tampak bahwa pengusahaan sungai dapat dilakukan oleh swasta berdasarkan kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan dengan POJ.

III. PERPINDAHAN ALIRAN SUNGAI KE LAHAN MASYARAKAT

A. Status Tanah di Pinggir Sungai

Sebelum ramainya pembangunan di Indonesia, khususnya di sektor industri, di tepi sungai hanya terlihat lahan pertanian dan perkebunan, sedangkan bangunan-bangunan yang berdiri hanya sedikit, kecuali di perkotaan. Di tepi sungai dimaksud adalah di luar badan sungai alam di luar wilayah perkotaan, yang tanggul sungainya berbatasan dengan atau merupakan lahan masyarakat. Namun apabila melihat keadaan sekarang, di tepi sungai (khususnya di sungai-sungai yang pada musim kemarau airnya cukup potensial) banyak berdiri bangunan pabrik industri.

Bagi pabrik, mendirikan bangunan pabrik di pinggir sungai dianggap menguntungkan, karena memudahkan mereka dalam mengambil air dan membuang limbah pabrik. Dengan demikian tidak heran apabila semula di pinggir sungai hanya terdapat hak milik (HM) atas tanah kemudian berubah atau bertambah dengan hak guna bangunan (HGB) misalnya di sungai Citarum Hilir Bandung Jatiluhur di desa Cilangkap Kecamatan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta, di sana muncul HGB atas nama

Pabrik Textil P.T. South Pacific Viscose dan P.T. Indo Barat Rayon, dan hak guna usaha (HGU).

Hak milik atas tanah masyarakat di pinggir sungai sebagian sudah bersertifikat tetapi sebagian masih merupakan hak milik adat. Tanah milik masyarakat yang telah disertifikat, misalnya di pinggir sungai Cipunagara di Kampung Jejerukan Desa Rancasari Kecamatan Pemanaukan Kabupaten/ Daerah Tingkat II Subang sebanyak kurang lebih dua hektar, di Desa Blanakan Kecamatan Ciasem Kabupaten/ Daerah Tingkat II Subang kurang lebih 0,8 hektar (POJ, 1996: 3). Bagi masyarakat, disertifikat atau tidak, tidak terlalu dihiraukan, karena mereka beranggapan apabila Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah miliknya telah dibayar, berarti bukti pembayaran pajak itu dianggap sebagai tanda bukti kepemilikan atas tanah tersebut. Misalnya yang terjadi pada tanah di pinggir Sungai Cigentis (lihat contoh kasus di halaman berikutnya).

Tanah masyarakat yang terkena perpindahan aliran sungai akibat dari penambangan galian golongan C, kebanyakan tanah milik adat yang sudah turun temurun, bahkan sudah dijual atau digadaikan. Apabila terjadi sengketa di atas tanah akibat penambangan galian golongan C di sungai, kadang-kadang sulit ditemukan pemilik tanah aslinya, sehingga masalahnya berlarut-larut.

B. Penambangan Galian Golongan C di Sungai

Setelah dikeluarkan PP NO. 42 Tahun 1990 tentang Perum Otorita Jatiluhur (POJ), bagi para penambang badan usaha swasta maupun perorangan yang melakukan penambangan di sungai-sungai yang dikelola POJ, yang telah mempunyai Surat Izin Penambangan Daerah (SIPD) dapat melakukan penambangan di sungai-sungai tersebut. Karena itu, setelah ada PP tersebut di atas, yang memberi kewenangan kepada POJ untuk mengusahakan sungai, maka prosedur dan mekanismenya harus mengikuti PP di atas dan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan secara teknis oleh POJ.

Berdasarkan Keputusan Direktur Perum Otorita Jatiluhur Nomor 1/AIR/01/KPTS/1989, penambang yang berminat melakukan penambangan di wilayah kerja POJ terlebih dahulu harus membuat Kontrak Karya yang isinya antara lain mengenai lokasi, volume deposit, tata cara penambangan, kelestarian lingkungan, dan harga kontrak. Kontrak karya ini akan dipakai sebagai rekomendasi teknis untuk mengurus pembuatan SIPD, yang dikeluarkan oleh Gubernur/Kepala daerah Tingkat I Jawa Barat. Mengingat

pembuatan SIPD memakan waktu kurang lebih dua bulan sampai enam bulan, sambil menunggu keluarnya SIPD, penambang dapat melakukan persiapan-persiapan di lapangan. Kegiatan penambangan baru dapat dilakukan apabila SIPD telah diterbitkan.

Pada umumnya penambangan berjalan lancar, namun berdasarkan laporan Triwulan Satuan Pengawasan Intern POJ Nomor 10/SPI/02/LHP/1995 tanggal 3 Oktober 1995 dan nomor 10/API/11/LHP/1996 tanggal 5 Maret 1996 penambangan di tempat-tempat tertentu menimbulkan permasalahan. Pengelola mengaku bahwa hak kepemilikan atas tanah bekas sungai menjadi hak pengelola, sementara di pihak lain yakni masyarakat mengaku pula hak kepemilikan lahan bekas sungai tersebut, bahkan terhadap aliran sungai yang barupun diakui miliknya. Alasannya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas lahan tersebut masih tetap dibayar oleh mereka (tidak dihapuskan).

Contoh kasus dalam laporan di atas, misalnya kasus yang terjadi di sungai Cipunagara dan sungai Cigentis. Adapun kasusnya adalah sebagai berikut:

1. Penambangan di lahan bekas sungai:

Nama penambang : P.T. Asta Alam Sentosa.
Nomor dan tanggal kontrak : 1/93/SPU/95, tanggal 12 September 1995.
Lokasi penambangan : Bantaran kiri sungai Cipunagara Desa Bantar Waru Kecamatan Haurgeulis Kabupaten/Daerah Tingkat II Indramayu.
Volume kontrak : 374.373,46 Cm³.

Permasalahan :

Penambang mengalami kesulitan dalam melaksanakan penambangan karena masyarakat menuntut ganti rugi, karena mereka mengaku bahwa tanah pada lokasi tersebut adalah miliknya. Penambang keberatan membayar ganti rugi karena berpendirian bahwa lahan/tanah bekas sungai itu meruakan hak dari pengelola yakni POJ. Berhubung tidak ada kesepakatan mengenai hal tersebut, akhirnya penambangan tidak jadi dilaksanakan.

2. Penambangan di aliran sungai baru.

Nama penambang : P.T. Sapta Muda Jayakarta.
Nomor dan tanggal kontrak : 1/60/SPU/1994, tanggal 15 Mei 1994.
Lokasi penambangan : Blok P.O.-P.43 Desa Tegalwaru Kecamatan Pangkalan Kabupaten/Daerah Tingkat II Karawang.

Volume kontrak : 120.167,60 Cm³.

Permasalahan :

- Penambang mengalami kesulitan melakukan penambangan, karena masyarakat menuntut ganti rugi atas penambangan yang dilakukan di lahan aliran sungai baru. Masyarakat mengaku bahwa tanah yang menjadi aliran sungai baru, sebagai perpindahan dari aliran sungai lama, adalah miliknya. Mereka menunjukkan alat bukti kepemilikan atas tanah berupa bukti pembayaran PBB atas tanah yang menjadi aliran sungai baru tersebut, yang masih mereka bayar. Kemudian penambang dilarang melakukan kegiatan penambangan oleh masyarakat sebelum penambang membayar ganti rugi. Penambang keberatan atas tuntutan ganti rugi tersebut, karena ia beranggapan bahwa aliran sungai ini adalah hak dan dikuasai oleh POJ. Kemudian masyarakat menutup jalan ke lokasi penambangan, karena tuntutannya tidak dikabulkan penambang. Dengan sangat terpaksa, akhirnya penambang mengabdikan tuntutan ganti rugi tersebut, namun masih menimbulkan permasalahan karena pada waktu pelaksanaan pembayaran ganti rugi, nama yang tercantum dalam bukti pembayaran PBB tidak sesuai dengan nama yang ada pada girik. Tanah dimaksud ada yang sudah dipindahtangankan melalui jual beli, warisan, hibah, atau gadai. Pada akhirnya kesulitan itu dapat diatasi yaitu dengan dibuatnya surat Keterangan Kepala Desa dan Camat yang menyatakan orang-orang tersebut adalah yang berhak mendapat ganti rugi.

Dari contoh kedua kasus tersebut, tampak bahwa ada perbedaan paham atas hak kepemilikan lahan atau tanah yang ditambang pada bekas aliran sungai atau pada aliran sungai baru antara masyarakat dengan pihak penambang. Perbedaan paham ini harus diantisipasi secara serius, karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi pelaksanaan penambangan, yakni dapat mengakibatkan penambangan terhenti bahkan bisa batal. Mengingat kegiatan penambangan bahan galian golongan C bermanfaat banyak bagi masyarakat dan di sisi lain masyarakat jangan sampai dirugikan akibat penambangan ini, maka harus dicari kepastian hukumnya, siapa yang berhak atas tanah/lahan yang berada pada bekas aliran sungai atau pada aliran sungai baru.

C. Penguasaan Lahan Bekas Sungai dan Aliran Sungai Baru

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Agraria, yang dapat disebut sebagai Undang-undang Pokok Agraria

(disingkat UUPA), yang merupakan sumber hukum pertanahan nasional Indonesia, tidak mengatur secara eksplisit atau khusus hak atas tanah di lahan bekas sungai atau di aliran sungai baru. Meskipun demikian, terdapat beberapa ketentuan UUPA yang dapat dipakai sebagai rujukan yuridis, untuk melihat status hak atas tanah pada lahan tersebut. Karena tanah/lahan pada lokasi pinggir sungai itu merupakan hak milik, hak guna bangunan dan hak guna usaha, maka beberapa pasal yang dimaksud, yang dapat dirujuk adalah Pasal 27, Pasal 34, dan Pasal 40.

Pasal 27 menyatakan hak milik hapus karena tanahnya jatuh kepada negara, penyerahan dengan sukarela, diterlantarkan, dan tanahnya musnah. Pasal 34 menyebutkan bahwa hak guna usaha hapus karena jangka waktunya berakhir, dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir akibat sesuatu syarat tidak dipenuhi, dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir, dicabut untuk kepentingan umum, diterlantarkan, dan tanahnya musnah. Kemudian Pasal 40 menyatakan bahwa hak guna bangunan hapus karena jangka waktunya berakhir, dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir akibat sesuatu syarat tidak dipenuhi, dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir, dicabut untuk kepentingan umum, diterlantarkan, dan tanahnya musnah.

Dari keempat hak atas tanah tersebut, salah satu penyebab hapusnya hak atas tanah adalah karena tanahnya musnah. Yang dimaksud musnahnya tanah adalah hilangnya tanah, baik karena gempa, erosi, banjir, gunung meletus, dan sebagainya. Pengertian hilang di sini bukan berarti tanah tersebut tidak ada secara fisik, namun fungsinya yang berubah. Contoh sebuah sungai menjadi daratan, daratan menjadi sungai, daratan menjadi danau, atau danau menjadi daratan.

Tanah-tanah yang berlokasi di pinggir sungai kebanyakan hapus karena banjir dan erosi, bahkan akhir-akhir ini banyak disebabkan oleh penambangan yang tidak mengikuti ketentuan. Ketentuan dimaksud misalnya kedalaman penambangan sudah ditentukan 3 meter, namun karena depositnya masih banyak, penambangan tersebut diteruskan sampai kedalaman 5 meter. Hal ini akan mengganggu keseimbangan tanah pada tebing sungai, sehingga terjadi longsor atau erosi, yang mengakibatkan tanah di pinggir sungai tersebut musnah. Persoalannya, apakah musnahnya tanah/lahan akibat aliran sungai baru secara mutlak menghapus hak kepemilikan atas tanah yang berubah fungsi tanpa penggantian dan menghapus segala hak atas kekayaan lain yang terkandung dalam tanah/lahan yang hapus atau berubah fungsi tersebut?

UUPA tidak mengatur lebih lanjut mengenai persoalan di atas. Berhubung hal tersebut tidak diatur dalam UUPA, maka solusi hukumnya dapat dilihat pada ketentuan KUH Perdata. Pasal 590 menyebutkan:

Jika sebuah bengawan atau sungai dengan mengambil jalan aliran baru memotong tanah di tepinya, sehingga karenanya terjadilah kepulauan-kepulauan, maka hak milik atas pulau itu adalah tetap pada pemilik tanah semula, pun jika hal ini terjadi dalam sebuah bengawan atau sungai yang dapat dilalui dengan perahu atau getek.

Kemudian Pasal 591 menyatakan hak milik atas setiap bengawan atau sungai mengandung di dalamnya hak milik atas tanah di mana bengawan atau sungai itu mengalir. Selanjutnya Pasal 592 menyebutkan:

Jika sebuah bengawan atau sungai mengambil jalan aliran baru dengan meninggalkan jalan aliran yang lama maka sekalian pemilik tanah yang karenanya kehilangan tanahnya, berhak sebagai gantinya memiliki tanah di jalan aliran yang ditinggalkan masing-masing dalam keseimbangan dengan tanah-tanah kehilangan mereka.

Dari pasal-pasal tersebut di atas dapat dikatakan bahwa apabila terjadi perpindahan aliran sungai, maka lahan bekas sungai dan bahan material yang ada di dalamnya dimiliki oleh pemegang hak atas tanah yang terkena aliran sungai baru, sebagai pengganti lahan yang terkena aliran sungai yang baru. Dengan demikian, apabila dihubungkan dengan ketentuan hapusnya hak atas tanah menurut UUPA, maka dalam hal tanah berubah fungsi, misalnya dari tanah sawah menjadi sungai akibat perubahan aliran sungai, maka hak atas tanah tersebut tidak hapus secara mutlak, karena pemilik hak atas tanah yang berubah menjadi sungai tetap menjadi pemilik atas tanah tersebut, atau mendapat tanah pengganti yakni bekas aliran sungai yang ditinggalkan.

Ketentuan dalam KUH Perdata tersebut ditegaskan kembali dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai, Pasal 17 Ayat (2), yang menyatakan "pemanfaatan lahan bekas sungal diprioritaskan untuk mengganti lahan yang terkena alur sungai baru, keperluan pembangunan prasarana pengairan, keperluan pembangunan lainnya dengan cara tukar bangunan, keperluan budi daya dengan syarat tertentu".

Dengan melihat ketentuan di atas jelas bahwa apabila terjadi perpindahan aliran sungai (dengan meninggalkan aliran sungai lama), maka

lahan bekas sungai (jalan aliran sungai lama) dimiliki oleh masyarakat yang tanahnya terkena aliran sungai baru yang luasnya disesuaikan dengan tanah yang terkena aliran sungai baru, termasuk deposit yang ada di dalamnya. Dengan demikian, jika terjadi konflik antara pengelola galian dengan masyarakat, seperti dikemukakan di atas, pihak pengelola harus menyadari bahwa tidak dibenarkan mengakui lahan bekas sungai. Sebaliknya masyarakat yang tanahnya terkena aliran sungai baru, apabila telah mendapat lahan pengganti yakni lahan bekas aliran sungai lama, maka lahan pada aliran sungai baru menjadi milik atau dikuasai oleh pengelola, walaupun PBB-nya masih tetap dibayar. Sesuai dengan Pasal 3 Ayat (1) PP No. 35 Tahun 1991 sungai baik baru maupun lama tetap dalam penguasaan pemerintah. Namun apabila masyarakat yang tanahnya terkena aliran sungai baru, tetapi tidak mendapatkan lahan pengganti (dari bekas aliran sungai lama) atau ganti rugi (dari pemerintah atau pengelola), maka lahan pada aliran sungai baru tersebut adalah tetap menjadi miliknya, sehingga apabila pemerintah hendak menguasainya, maka ia harus membayar ganti rugi kepada masyarakat pemilik tanah tersebut.

Adanya kewajiban penambang memberikan ganti rugi kepada masyarakat pemilik lahan, dapat dilihat dari ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan Pasal 25, yang menyatakan:

- (1) Pemegang kuasa pertambangan diwajibkan mengganti kerugian akibat dari usahanya pada segala sesuatu yang berada di atas tanah kepada yang berhak atas tanah di dalam lingkungan daerah kuasa pertambangan maupun di luarnya, dengan tidak memandang apakah perbuatan itu dilakukan dengan atau tidak dengan sengaja, maupun yang dapat atau tidak dapat diketahui terlebih dahulu.
- (2) Kerugian yang disebabkan oleh usaha-usaha dari dua pemegang kuasa pertambangan atau lebih, dibebankan kepada mereka bersama.

Ketentuan mengenai ganti rugi dapat pula dilihat pada Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 7 Tahun 1995 tentang Usaha Penambangan Bahan Galian Golongan C. Dalam Pasal 32 dikatakan bahwa:

Pengusahaan tanah untuk pertambangan bahan galian golongan C dapat dilakukan antara lain melalui:

- a. Pemberian atau pembebasan hak atas tanah;
- b. Ijin penggunaan tanah;

- c. Perjanjian bagi hasil atau kerjasama lainnya;
- d. Sewa.

Kemudian Pasal 33 Ayat (3) dan (4) menyebutkan:

- (3) Usaha pertambangan yang berlokasi pada tanah negara yang dibebani suatu hak atas nama perorangan, badan usaha atau badan hukum swasta terlebih dahulu harus mendapat ijin dari pemegang hak atas tanah berupa kesepakatan mengenai hubungan hukum antara perusahaan pertambangan dengan pemegang hak yang bersangkutan.
- (4) Usaha pertambangan yang berlokasi pada tanah milik perorangan, terlebih dahulu harus mendapat ijin dari pemilik berupa kesepakatan mengenai hubungan hukum antara perusahaan penambangan dengan pemegang hak yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, sebelum melakukan penambangan, penambang terlebih dahulu harus mendapat ijin dari pemilik hak atas tanah atau lahan. Demikian pula dengan penambangan yang dilakukan di lahan bekas aliran sungai atau di aliran sungai baru, penambang harus mendapatkan ijin dari pemegang hak atas tanah atau lahan tersebut. Apabila ijin telah diperoleh, penambang dapat melakukan pembelian, pembebasan dengan pembayaran ganti rugi, sewa menyewa lahan, atau perjanjian bagi hasil dengan pemegang hak atas tanah atau lahan tersebut.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perpindahan aliran sungai ke lahan masyarakat dapat menimbulkan konflik hak kepemilikan lahan tersebut. Meskipun demikian, menurut beberapa ketentuan, sebagaimana penulis kemukakan di atas, hak kepemilikan lahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Lahan bekas aliran sungai yang terjadi akibat perpindahan aliran sungai merupakan hak milik dari pemilik lahan yang terkena aliran sungai baru, sebagai pengganti atas hak milik atas lahannya yang terkena aliran sungai baru, yang luasnya diseimbangkan dengan luas lahan yang terkena aliran sungai baru.
2. Lahan aliran sungai baru menjadi milik pemerintah sebagai penguasa atas sungai. Karena itu masyarakat tidak berhak atas lahan pada aliran sungai baru tersebut dengan alasan Pajak Bumi dan Bangunannya masih

dibayar, kecuali masyarakat pemilik lahan tersebut tidak mendapatkan lahan pengganti atau ganti rugi dari pemerintah.

B. Saran

Penambangan di lahan bekas sungai menimbulkan permasalahan, yakni konflik kepemilikan atas lahan tersebut antara pihak pemerintah dengan masyarakat. Meskipun ketentuan yang mengaturnya telah ada, konflik tersebut akan terus berkepanjangan, apabila tingkat pengetahuan masyarakat atau aparat tentang aturan tersebut tidak sama. Untuk mengatasi hal tersebut, beberapa saran penulis dapat kemukakan sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintah dalam hal ini Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia bersama aparat terkait, misalnya Perum Otorita Jatiluhur, Departemen Pertambangan dan Energi, Pemerintah Daerah, dan sebagainya mengadakan penyuluhan hukum bidang pertanahan, perairan (khususnya sungai), pertambangan (khususnya galian golongan C), sehingga tidak terjadi permasalahan, atau jika terjadi permasalahanpun dapat diselesaikan relatif cepat dan adil.
2. Masyarakat melapor sekaligus mendaftarkan ke Kantor PBB bahwa lahan yang terkena aliran sungai baru telah diganti dengan lahan bekas aliran sungai lama, sehingga beban pajak atas lahan yang terkena aliran sungai baru berkurang, dan mendapat bukti pembayaran PBB atas lahan pengganti tersebut.
3. Masyarakat mengajukan permohonan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional untuk mendapatkan hak kepemilikan atas lahan bekas sungai yang luasnya disesuaikan dengan lahan yang terkena aliran sungai baru, sehingga masyarakat mempunyai bukti kepemilikan yang autentik atas lahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Kehakiman, Dirjan Hukum dan Perundang-undangan. *Undang-undang Pokok Agraria dan Peraturan Pelaksananya*. Jakarta: Dirjan Hukum dan Perundang-undangan, 1985.

Indonesia. *Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.*

_____. *Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.*

_____. *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Otorita Jatiluhur.*

_____. *Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai.*

Menteri Pekerjaan Umum. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 52/PRT/1991 tentang Kebijakan Umum Pengelolaan Perusahaan Umum Otorita Jatiluhur.*

_____. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai, dan Bekas Sungai.*

Subekti, R. dan Tjitro Sudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata.* Jakarta: Pradnya Pramita, 1978.